

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA KECOMBERAN KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

Okky Pancawati¹, Moh. Taufik Hidayat², RM. Haryo Bharoto³

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon". Desa Kecomberan memiliki penduduk dengan tingkat partisipasi dalam program keluarga berencana yang sudah berjalan namun masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya dasar pengetahuan masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana, masyarakat yang memiliki kepercayaan pada keyakinan tertentu, hingga pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena ingin menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi yang timbul di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berupa foto maupun rekaman. Dalam pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan sumber karena ingin membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dan Kepala UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kecamatan Talun sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui pegawai maupun bidan desa berupa sosialisasi atau penyuluhan mengenai program keluarga berencana walaupun masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dibutuhkan teori menurut Bintoro Tjokroamidjojo yang di dalamnya terdiri dari tiga elemen penting yaitu (1) Masalah Kepemimpinan, (2) Komunikasi, dan (3) Pendidikan.

Katakunci: Partisipasi, Program Keluarga Berencana, Desa Kecomberan.

ABSTRACT

The title of this research is "Community Participation in the Implementation of Family Planning Program in Kecomberan Village, Talun Sub-district, Cirebon District". Kecomberan village has a population with participation rate in family planning program that has been running but still not optimal due to the lack of basic knowledge of the importance of family planning program, people who have confidence in certain beliefs, to the mindset of the community that states that many children a lot of sustenance. The purpose of this research is to know how the community participation in the implementation of family planning program in Kecomberan Village, Talun Sub-district, Cirebon District. The research method used by the authors in this study is a qualitative method that is descriptive because it wants to describe, summarize the various conditions, situations arising in the community. Data collection techniques used in this study are

literature / literature studies, observation, interviews, and documentation in the form of photographs and recordings. In testing the validity of data, the authors use triangulation techniques with the source, because it wants to compare and check back the degree of confidence of information obtained through different times and tools in qualitative research. Data analysis techniques used in this study is a qualitative data analysis that includes data reduction, data display, verification, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Head of Village and Head of Technical Implementation Unit of Family Planning Control of Women Empowerment and Child Protection of Talun Sub-district has provided information to the community through employees as well as village midwives in the form of socialization or counseling about family planning program although it still has obstacles in its implementation. To increase community participation, the theory is based on Bintoro Tjokroamidjojo which consists of three important elements, namely (1) Leadership Problem, (2) Communication, and (3) Education.

Keywords: Participation, Family Planning Program, Kecomberan Village

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang telah direncanakan oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan negara. Dengan adanya pembangunan di wilayah tertentu, ternyata dapat menunjukkan bahwa terdapat usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan secara bertahap dan berencana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia atau masyarakat yang dilakukan secara bertahap.

Pembangunan dapat berupa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, dimana

pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, begitu pula dengan pembangunan daerah yang juga dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah tentunya dibutuhkan peran dari pemerintah daerah, karena pemerintah mempunyai kewenangan guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, hingga ketentraman bagi masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat

daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan daerah memiliki tujuan umum yaitu untuk mensejahterakan rakyat, dimana kesejahteraan rakyat ini dapat dilihat dari kualitas hidup penduduknya dan kualitas keluarga agar dapat berkembang menjadi masyarakat yang maju dan lebih baik lagi. Untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka program pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu program tersebut adalah program keluarga berencana (KB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menjelaskan pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah sebagai berikut:

“Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai

dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”.

Program keluarga berencana (KB) ini dirancang sebagai usaha pemerintah untuk membangun manusia yang berkualitas, karena program keluarga berencana (KB) adalah suatu gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran yang dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB), masyarakat semestinya terlibat dalam keseluruhan proses untuk melakukan partisipasi. Adapun pengertian partisipasi menurut Aprillia Theresia (2015:196) adalah sebagai berikut:

“Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan”.

Partisipasi sangatlah penting bahkan menjadi salah satu tujuan dari program keluarga berencana itu sendiri, yaitu terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan program secara berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keberhasilan program keluarga berencana tidak semata-mata mengandalkan pemerintah saja, namun peran dari seluruh masyarakat pun juga

ikut mempengaruhi keberhasilan dari program tersebut. Masyarakat sebagai pelaku utama memiliki keterlibatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program keluarga berencana.

Dari pertimbangan tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana diupayakan untuk ditumbuhkembangkan yang mana dimulai dari masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di desa tentunya diperlukan adanya pemerintahan desa yang dapat membantu dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai program yang ada kepada masyarakat, sehingga diharapkan program tersebut nantinya dapat berjalan dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Talun terdiri dari 11 desa, dimana diantara 11 desa tersebut

salah satunya adalah Desa Kecomberan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Desa Kecomberan memiliki penduduk dengan tingkat partisipasi dalam program keluarga berencana (KB) yang sudah berjalan namun masih belum optimal dimana hal tersebut dibuktikan dengan masih kurangnya dasar pengetahuan masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana (KB), masyarakat yang memiliki kepercayaan pada keyakinan tertentu, seperti halnya bahwa program keluarga berencana adalah haram untuk dilakukan, hingga pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Sehingga, dalam hal ini terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana (KB) khususnya MOW. Dari bermacam-macam alat kontrasepsi seperti suntik, pil, dan sebagainya, penggunaan alat kontrasepsi dalam bentuk MOW ini mendapatkan jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya.

Adapun penggunaan alat kontrasepsi yang tertera pada tabel mengenai Catatan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB dan Bukan Peserta

KB di Desa Kecomberan pada Bulan Februari dan Maret 2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Catatan PUS Peserta KB dan PUS Bukan Peserta KB Desa Kecomberan

| Macam Peserta | Keterangan | Bulan | | Jumlah | |
|---------------|---------------|----------|------------|------------|------|
| | | Februari | Maret | | |
| Peserta Aktif | Jumlah PUS | 1379 | 1383 | 2762 | |
| | IUD | P | 36 | 36 | 72 |
| | | S | 44 | 44 | 88 |
| | MO | P | 14 | 14 | 28 |
| | | S | 37 | 37 | 74 |
| | MOP | P | 2 | 2 | 4 |
| | | S | 0 | 0 | 0 |
| | Kondom | P | 11 | 11 | 22 |
| | | S | 20 | 20 | 40 |
| | Implan | P | 30 | 32 | 62 |
| | | S | 0 | 0 | 0 |
| | Suntik | P | 326 | 328 | 654 |
| | | S | 258 | 258 | 516 |
| | Pil | P | 73 | 73 | 146 |
| | | S | 94 | 94 | 188 |
| | Jumlah | P | 492 | 496 | 988 |
| | | S | 453 | 453 | 906 |
| | Total | | 945 | 949 | 1894 |
| | Bukan Peserta | Hamil | 74 | 73 | 147 |
| IAS | | 161 | 161 | 322 | |
| IAD | | 61 | 62 | 123 | |

| | | | | |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
| rta | TIAL | 138 | 138 | 276 |
| KB | Total | 434 | 434 | 868 |

Sumber: UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Talun Bulan Februari – Maret 2018

Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, karena ingin menggambarkan, memahami, hingga meringkaskan berbagai situasi dan kondisi yang timbul di masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Literatur
2. Observasi
3. Wawancara
4. Dokumentasi

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Informan Kunci:

1. Masyarakat
2. Kepala UPT PPKBP3A Kecamatan Talun

Informan Pendukung:

1. Kepala Desa Kecomberan

2. Pegawai UPT PKBP3A Kecamatan Talun
3. Bidan Desa

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menguji keabsahan data karena dilakukan dengan cara membandingkan (*check, recheck, crosscheck*) berbagai data yang diperoleh. Penulis menggunakan teknik triangulasi dengan sumber karena ingin membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam data yang diperoleh berupa informasi dari para informan dan hasil observasi. dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Verifikasi data
4. Penarikan kesimpulan

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Aprillia Theresia (2015:196), partisipasi adalah

keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995:226) terdapat hal yang mempengaruhi partisipasi yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah kepemimpinan, yaitu unsur utama dari proses pengendalian usaha dalam pembangunan ditentukan sekali oleh adanya, serta kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan sangat menentukan atau penentu utama dari bisa atau tidaknya proses pembangunan terselenggara.
- b. Komunikasi, segi lain yang mendapat perhatian administrasi pembangunan untuk lebih terdapatnya partisipasi adalah komunikasi. Gagasan-gagasan, kebijaksanaan, dan rencana hanya akan mendapat dukungan bila diketahui dan kemudian dimengerti. Bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat). Kemudian diterima dengan pengertian masyarakat bahwa hasil daripada kebijaksanaan rencana itu akan

betul-betul sebagian atau seluruh dipetik oleh masyarakat.

- c. Pendidikan yaitu masalah yang sangat penting dalam pembangunan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional, bahkan pendidikan memberikan prasyarat kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang dan disertai dengan pengembangan nilai-nilai dan sikap-sikap, kualitas hidup sebagai bangsa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupate Cirebon

Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana sangat dibutuhkan mengingat jumlah penduduk di Desa Kecomberan mencapai angka yang tidak sedikit. Desa Kecomberan saat ini memiliki tingkat partisipasi dalam program KB yang sudah berjalan namun masih belum optimal. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang belum

berpartisipasi dikarenakan masih kurangnya dasar pengetahuan akan pentingnya program keluarga berencana (KB), masyarakat yang memiliki kepercayaan pada keyakinan tertentu, seperti halnya bahwa program keluarga berencana adalah haram untuk dilakukan, hingga pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki.

a) Masalah Kepemimpinan

Mengenai dimensi kepemimpinan yaitu bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat saat ini sudah dilakukan oleh Kepala UPT Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kecamatan Talun dan Kepala Desa Kecomberan melalui PLKB maupun TPD dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, namun untuk mengendalikan atau memberikan arahan agar pegawai dapat bekerja lebih giat dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi khususnya pada masyarakat yang berada di blok belakang desa yang dilakukan dengan pemberian insentif yang mana pemberian insentif ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai ini masih

belum sesuai karena terdapat keterbatasan anggaran.

b) Komunikasi

Mengenai dimensi komunikasi yaitu bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh PLKB, TPD, maupun bidan desa berupa sosialisasi atau penyuluhan maupun pendekatan kepada masyarakat dengan sistem door to door (pintu ke pintu) atau perorangan, namun untuk pemahaman dari masyarakat tentang informasi mengenai KB yang telah diberikan dinilai masih belum optimal.

c) Pendidikan

Mengenai dimensi pendidikan yaitu bahwa pendidikan sangat dibutuhkan dan mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana (KB). Seperti halnya dalam memberikan pendidikan non formal kepada masyarakat yang tentunya mempengaruhi pada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang program KB. Sehingga, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, maka masyarakat memiliki tingkat kesadaran untuk berpartisipasi, sedangkan masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung untuk ikut-ikutan.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

a) Faktor Fanatisme Dalam Ajaran Agama

Masih ada sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program keluarga berencana karena tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa 2 (dua) anak adalah cukup karena diharuskan memiliki banyak anak, dan dengan adanya hal tersebut, maka dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana (KB).

b) Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dan masyarakat yang masih belum memahami betul tentang program tersebut walaupun sudah diberikan pemahaman melalui pemberian informasi atau penyuluhan.

c) Faktor Anggaran

Saat ini untuk melakukan kegiatan baik berupa penyuluhan individu dengan sistem door to door (pintu ke pintu)

maupun penyuluhan kelompok yang diadakan di suatu tempat masih terbatas serta untuk meningkatkan kinerja Tenaga Penggerak Desa (TPD) maupun Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui pemberian dana insentif pun masih terkendala. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah.

4.3 Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

a) Adanya Kerjasama Lintas Sektor

Kerjasama lintas sektor perlu untuk dilakukan, baik antar kecamatan, desa, hingga tokoh ulama, karena tentunya pihak-pihak yang terkait tersebut harus terlibat dalam program keluarga berencana karena menyangkut dengan program pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB serta untuk mengendalikan jumlah penduduk.

b) Adanya Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih

memahami, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana.

c) Adanya Dukungan Anggaran Dari Pemerintah

Diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk anggaran baik untuk memberikan pelatihan bagi para kader maupun untuk hal lain dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana, sehingga pelaksanaan program keluarga berencana ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

Berdasarkan dimensi yang telah dipaparkan mengenai kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini sudah berjalan namun dalam

pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya dasar pengetahuan masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana, masyarakat yang memiliki kepercayaan pada keyakinan tertentu, hingga pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga menyebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi. Secara signifikan, dimensi pendidikanlah yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana (KB), karena masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat kesadaran dan keaktifan untuk berpartisipasi, sedangkan masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung untuk ikut-ikutan.

2) Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

a) Faktor Fanatisme Dalam Ajaran Agama

Masih ada sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program keluarga berencana karena tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan

bahwa 2 (dua) anak adalah cukup karena diharuskan memiliki banyak anak, dan dengan adanya hal tersebut, maka dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana (KB).

b) Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dan masyarakat yang masih belum memahami betul tentang program tersebut walaupun sudah diberikan pemahaman melalui pemberian informasi atau penyuluhan.

c) Faktor Anggaran

Untuk melakukan kegiatan baik berupa penyuluhan individu dengan sistem door to door (pintu ke pintu) maupun penyuluhan kelompok yang diadakan di suatu tempat masih terbatas serta untuk meningkatkan kinerja Tenaga Penggerak Desa (TPD) maupun Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui pemberian dana insentif pun masih terkendala. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah.

3) Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

- a) Adanya Kerjasama Lintas Sektor
Kerjasama lintas sektor perlu dilakukan, baik antar kecamatan, desa, hingga tokoh ulama karena tentunya pihak-pihak yang terkait tersebut harus terlibat dalam program keluarga berencana karena menyangkut dengan program pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB serta untuk mengendalikan jumlah penduduk.
- b) Adanya Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana.
- c) Adanya Dukungan Anggaran dari Pihak Pemerintah
Diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk anggaran baik untuk memberikan pelatihan bagi para

kader maupun untuk hal lain dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana, sehingga pelaksanaan program keluarga berencana ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Yusuf Zainal dan Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Pengantar Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Basrowi, et.al. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Saifuddin, Abdul Bari dkk. (Ed.). 2012. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sulistiyawati, Ari. 2011. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika <http://pkbijateng.or.id/mengenal-jenis-kontrasepsi/> Diakses 13 Maret 2018
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia <http://jatim.bkkbn.go.id/category/alkon/> Diakses 17 Maret 2018
- Theresia, Aprillia, et.al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- _____. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, dan M. Makmur. 2015. Jurnal Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya
- Jaya Saputra, Handy. 2015. Jurnal Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari). Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Shalfiah, Ramandita. 2013. Jurnal Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang. Ilmu Pemerintahan. Fisip Universitas Mulawarman
- <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> Diakses 2 Februari 2018